



**LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER II TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
(098654)**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Ahmad Yani No. 133

Telp. 0627 22201/21053 Fax. 0627 21053

Dairi - Sumatera Utara 22212

e-mail : keuanganpn.sidikalang@yahoo.com



Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 Tingkat UAKPA satuan kerja Pengadilan Negeri Sidikalang. Satuan kerja Pengadilan Negeri Sidikalang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester II 2024 Satuan kerja Pengadilan Negeri Sidikalang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan No. 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara nomor S-31/PB/2025 tanggal 23 Januari 2025 hal Penyelesaian Administratif terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sidikalang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sidikalang, 06 Februari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang

Eva Rina Sihombing


DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan Laporan Keuangan	v
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	8
III. Laporan Operasioanal	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
A.1 Profil Pengadilan Negeri Sidikalang	11
A.2 Nilai Kinerja Organisasi	11
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	11
A.4 Basis Akuntansi	11
A.5 Dasar Pengukuran	12
A.6 Kebijakan Akuntansi	12
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	17
B.1 Pendapatan	18
B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak	18
B.2 Belanja	18
B.2.1 Belanja Pegawai	19
B.2.2 Belanja Barang	20
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	21
C.1 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	21
C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas	21
C.3 Persediaan	21
C.4 Tanah	22
C.5 Peralatan dan Mesin	22
C.6 Gedung dan Bangunan	20
C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	23
C.8 Aset Lain-lain	23
C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	23
C.10 Utang kepada Pihak Ketiga	24
C.11 Uang Muka dari KPPN	24
C.12 Utang yang belum ditagihkan	25
C.13 Ekuitas	25
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	26
D.1 Beban Pegawai	26
D.2 Beban Persediaan	26
D.3 Beban Barang dan Jasa	27
D.4 Beban Pemeliharaan	27
D.5 Beban Perjalanan Dinas	28
D.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi	28
D.7 Surplus (Defisit) dari Penjualan Aset Non Lancar	28

E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	29
E.1 Ekuitas Awal	29
E.2 Surplus (Defisit) LO.....	29
E.3 Dampak Kumulatif Penambahan Kebijakan/kesalahan Mendasar.....	29
E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	29
E.5 Transaksi Antar Entitas	29
E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	29
E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar.....	29
E.6 Ekuitas Akhir	29
F. Pengungkapan Penting Lainnya	30
F.1 Kejadian Penting Setelah tanggal di Neraca.....	30
I. Lampiran dan Daftar	31



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Jalan Ahmad Yani Nomor 133 Sidikalang, Kab. Dairi
Sumatera Utara. www.pn-sidikalang.go.id, info@pn-sidikalang.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sidikalang yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



Sidikalang, 06 Februari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang

Eva Rina Sihorbing
Eva Rina Sihorbing

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sidikalang Semester II Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan No. 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara nomor S-31/PB/2025 tanggal 23 Januari 2025 hal Penyelesaian Administratif terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.18.776.390,- berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.18.776.390,- atau mencapai 133 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp.14.094.000,-

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 4.358.497.386 atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.366.880.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2024 . Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 12.337.236.341,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.1.543.500; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 12.335.692.841 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 20.002.549,- dan Rp.12.317.233.792,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 16.109.665,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 4.834.795.532,- sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp. 430.100,- Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (4,818,255,767,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp.12.768.288.563,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (4,818,255,767,-) kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 4,367,200,996,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 12,317,233,792,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024			% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS/(BAWAH)		REALISASI
PENDAPATAN	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	14.094.000	18.776.390	4.682.390	133	16.848.134
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		14.094.000	18.776.390	4.682.390	133	16.848.134
BELANJA	B.2.					
Belanja Pegawai	B.2.1	3.007.743.000	2.999.898.583	(7.844.417)	99,74%	2.738.022.122
Belanja Barang	B.2.2	1.270.637.000	1.270.098.803	(538.197)	99,96%	1.184.615.499
Belanja Modal	B.2.3	88.500.000	88.500.000	-	100,00%	240.000.000



Sidikalang, 06 Februari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang

Eva Rina Sihombing

PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
NERACA
PER 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
ASET					
ASET LANCAR					
Persediaan	C.1	1.543.500	7.362.000	(5.818.500)	(79,03)
Jumlah Aset Lancar		1.543.500	7.362.000	(5.818.500)	(79,03)
ASET TETAP					
Tanah	C.2	7.776.428.000	7.776.428.000	-	-
Peralatan dan Mesin	C.3	2.568.804.774	2.529.883.774	38.921.000	1,54
Gedung dan Bangunan	C.4	6.659.119.909	6.659.119.909	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.5	21.387.000	21.387.000	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.6	(4.690.046.842)	(4.211.880.182)	(478.166.660)	11,35
Jumlah Aset Tetap		12.335.692.841	12.774.938.501	(439.245.660)	(3,44)
ASET LAINNYA					
Aset tak berwujud	C.7	35.000.000	35.000.000	-	-
Aset lain-lain	C.8	77.617.000	197.075.800	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Lainnya	C.9	(112.617.000)	(232.075.800)	119.458.800	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-	119.458.800	-
JUMLAH ASET		12.337.236.341	12.782.300.501	(325.605.360)	(2,55)
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	17.264.674	13.510.688	3.753.986	27,79
Pendapatan Diterima di Muka	C.11	2.737.875	501.250	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		20.002.549	14.011.938	3.753.986	26,79
JUMLAH KEWAJIBAN		20.002.549	14.011.938	3.753.986	26,79
EKUITAS					
Ekuitas	C.12	12.317.233.792	12.768.288.563	(451.054.771)	(3,53)
JUMLAH EKUITAS		12.317.233.792	12.768.288.563	(451.054.771)	(3,53)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12.337.236.341	12.782.300.501	(447.300.785)	(3,50)

Sidikalang, 06 Februari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang



Eva Rina Sihombing

PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2024
DAN 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	16.109.665	16.346.884	(237.219)	-
JUMLAH PENDAPATAN		16.109.665	16.346.884	(237.219)	(1,46)
BEBAN					
Beban Pegawai	D.2	3.002.747.583	2.736.583.122	266.164.461	9,73
Beban Persediaan	D.3	54.456.000	46.262.000	8.194.000	17,71
Beban Barang dan Jasa	D.4	663.262.662	670.664.031	(7.401.369)	(1,10)
Beban Pemeliharaan	D.5	507.902.288	420.099.280	87.803.008	20,90
Beban Perjalanan Dinas	D.6	51.201.339	41.850.932	9.350.407	22,34
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	555.225.660	561.018.529	(5.792.869)	(1,03)
JUMLAH BEBAN		4.834.795.532	4.476.477.894	358.317.638	8,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL					
		(4.818.685.867)	(4.460.131.010)	358.554.857	(8,04)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non L	D.8	430.100	-	430.100	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		430.100	-	430.100	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA					
		(4.818.255.767)	(4.460.131.010)	(358.124.757)	8,03
POS LUAR BIASA					
		-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO					
		(4.818.255.767)	(4.460.131.010)	(358.124.757)	8,03

Sidikalang, 06 Februari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang

Eva Rina Sihombing

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan
EKUITAS AWAL	E.1	12.768.288.563	13.064.702.859	(296.414.296)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(4.818.255.767)	(4.460.131.010)	(358.124.757)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	(3.662.523)	
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		-	(3.662.523)	
JUMLAH		-	(3.662.523)	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	4.367.200.996	4.167.379.237	199.821.759
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(451.054.771)	(296.414.296)	(154.640.475)
EKUITAS AKHIR	E.6	12.317.233.792	12.768.288.563	(451.054.771)

Sidikalang, 06 Februari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang



Eva Rina Sihombing

A. Penjelasan Umum

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.1. Profil Pengadilan Negeri Sidikalang

Pengadilan Negeri Sidikalang sebagai instansi vertikal bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Sidikalang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah menetapkan visi, yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sidikalang Yang Agung”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Sidikalang menjalankan misi yang meliputi:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Meningkatkan pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.
5. Meningkatkan profesionalisme kinerja aparat pengadilan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sidikalang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Aplikasi SAKTI Modul GL dan Pelaporan dan Aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap dan Persediaan. SAKTI Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SAKTI Modul Aset dan Persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Sidikalang Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan

peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

*Dasar
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan satuan kerja Pengadilan Negeri Sidikalang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari satuan kerja Pengadilan Negeri Sidikalang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Kantor Xxx adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

*Pendapatan-
LRA*

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - b) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari

penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran

Satuan kerja Pengadilan Negeri Sidikalang memperoleh alokasi Anggaran Tahun 2024 awal sebesar Rp.4.105.380.000,- Selama Semester II tahun 2024 Satuan kerja Pengadilan Negeri Sidikalang telah melakukan revisi POK sebanyak empat (4) kali. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 14.094.000	14.094.000
Jumlah Pendapatan	14.094.000	14.094.000
Belanja		
Belanja Pegawai	3.007.743.000	3.007.743.000
Belanja Barang	1.270.637.000	1.270.637.000
Belanja Modal	88.500.000	99.500.000
Jumlah Belanja	4.278.380.000	4.278.380.000

**Realisasi
Pendapatan
Rp.18.776.390,-**

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.18.776.390,- atau mencapai 133 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.14.094.000,- Pendapatan satuan kerja Pengadilan Negeri Sidikalang terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.18.776.390,-

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan Pajak	14.094.000	18.776.390	133,22
Jumlah	14.094.000	18.776.390	133,22

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 11.4 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	18.776.390	16.848.134	11,4
Jumlah	18.776.390	16.848.134	11,4

**Realisasi
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak
Rp.18.776.390**

B.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.18.776.390,- dan Rp. 16.848.134,- Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester II Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	18.776.390	16.848.134	11
Jumlah	18.776.390	16.848.134	11

B.2 Belanja

**Realisasi Belanja
Rp.4.358.497.386**

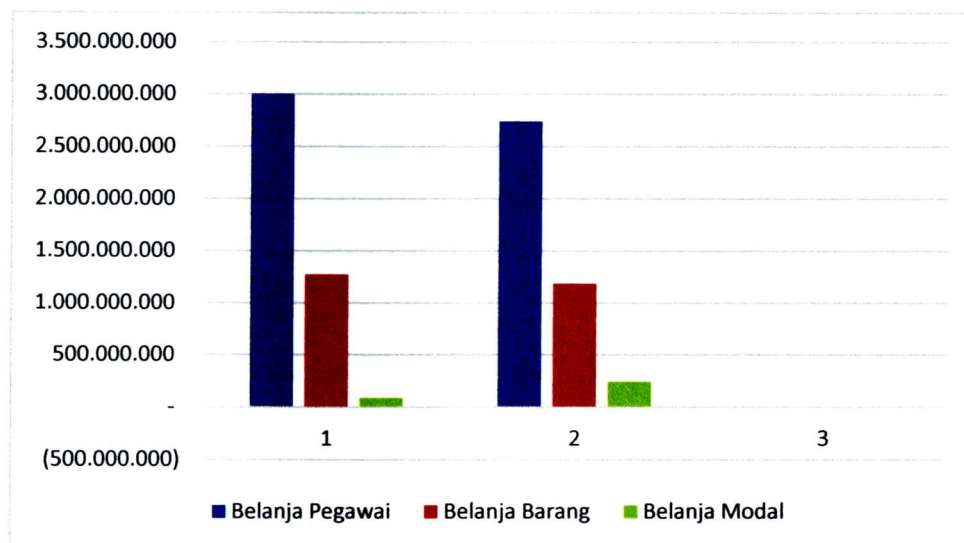
Realisasi Belanja pada Semester II tahun 2024 adalah sebesar Rp.4.358.497.386,- atau 99.81 % dari anggaran belanja sebesar Rp.4.366.880.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2024

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	3.007.743.000	2.999.898.583	99,74
Belanja Barang	1.270.637.000	1.270.098.803	99,96
Belanja Modal	88.500.000	88.500.000	
Jumlah	4.366.880.000	4.358.497.386	99,81

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2024



Dibandingkan dengan Semester II tahun 2023, Realisasi belanja mengalami kenaikan sebesar 4 %. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan anggaran di tahun dan adanya kenaikan gaji pegawai sesuai Perpres Nomor 10 tahun 2024. Berikut rincian realisasi belanja TA 2024 dan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2024 dan 2023

Belanja Pegawai	2.999.898.583	2.738.022.122	9,56
Belanja Barang	1.270.098.803	1.184.615.499	7,22
Belanja Modal	88.500.000	240.000.000	(63,13)
Jumlah	4.358.497.386	4.162.637.621	4,71

*Realisasi Belanja
Pegawai Pegawai
Rp.2.999.898.583,*

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.2.999.898.583,- dan Rp.2.738.022.122,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 9.56 % dibanding Tahun 2023. Realisasi belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp.2.999.898.583,-sedangkan tahun 2023 sebesar Rp.2.738.022.122,- Hal tersebut adalah karena adanya kenaikan gaji sesuai Perpres nomor 10 Tahun 2024 dan adanya penambahan pegawai mutasi juga CPNS .

Perbandingan Belanja Pegawai Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban gaji pokok PNS	1.163.943.080	1.004.942.660	15,82
Beban pembulatan gaji PNS	17.355	16.916	2,60
Beban tunj.suami/istri	82.380.030	67.926.170	21,28
Beban tunj.anak	16.890.022	14.589.050	15,77
Beban tunj. Struktural	28.140.000	24.710.000	13,88
Beban tunj.fungsional	1.312.780.000	1.263.640.000	3,89
Beban tunj.pph	135.352.670	115.841.250	16,84
Beban tunj.beras	57.573.900	51.563.040	11,66
Beban uang makan	194.402.000	183.023.000	6,22
Beban tunj.umum PNS	8.420.000	11.770.000	(28,46)
Jumlah Belanja	2.999.899.057	2.738.022.086	9,56

Realisasi
Belanja Barang
Rp.1.270.098.803

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1.270.098.803,- dan Rp.1.184.615.499. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 7.2% dari Realisasi TA 2023.

Realisasi belanja barang operasional lainnya, belanja langganan air, belanja pemeliharaan mengalami kenaikan sementara realisasi belanja honor operasional, belanja barang konsumsi, belanja langganan telepon mengalami penurunan.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	571.288.800	564.962.480	1,12
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.956.480	4.351.500	(9,08)
Belanja Honor Operasional Satker	30.480.000	48.012.000	(36,52)
Belanja barang operasional lainnya	3.598.000	2.731.500	31,72
Belanja Barang Persediaan Barang konsumsi	48.782.500	52.149.000	(6,49)
Belanja langganan telepon	1.242.096	1.319.507	(5,87)
Belanja langganan air	5.197.300	2.039.300	154,86
Belanja sewa	46.597.000	45.360.000	2,73
Belanja pemeliharaan gedung bangunan	254.570.550	206.644.700	23,19
Belanja pemeliharaan gedung bangunan lainnya	83.652.000	78.623.795	6,40
Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	189.554.738	131.050.785	29,38
Belanja perjalanan dinas	51.201.339	41.850.932	22,34
Belanja barang ekstakomptabel	-	5.520.000	(100,00)
Jumlah Belanja	1.270.098.803	1.184.615.499	7,22

Realisasi
Belanja Modal
Rp.88.500.000,-

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Sidikalang per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp. 88.500.000,- dan Rp. 240.000.000,-. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal TA 2024 adalah belanja peralatan dan mesin berupa lemari besi, lemari kayu dan kursi besi. Realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami penurunan sebesar 63,13 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2023. Hal ini disebabkan pengurangan pagu belanja modal.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Belanja Modal	88.500.000	240.000.000	(63,13)
Jumlah	88.500.000	240.000.000	(63,13)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Persediaan
Rp.1.543.500,-

C.1. Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.1.543.500,- dan Rp.7.362.000,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester II TA 2024 dan 2023

Jenis	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Barang Konsumsi	1.543.500	7.362.000
Jumlah	1.543.500	7.362.000

Tanah
Rp.7.776.428.000

C.2. Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.7.776.428,- dan Rp7.776.428,-

Rincian Tanah Semester II TA 2024 dan 2023

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	7.776.428.000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	0
Saldo per 30 Juni 2024	7.776.428.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Semester II TA 2024

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	536	Jl.Aman Sidikalang	877.968.000
2	1.200	Jl.Aman Sidikalang	522.900.000
3	240	Jl.Aman Sidikalang	107.100.000
4	366	Jl.Aman Sidikalang	266.265.000
5	400	Jl.Aman Sidikalang	453.000.000
6	1.035	Jl.Sekolah Sidikalang	948.578.000
7	4011	Jl.Ahmad Yani No.133 Sidikalang	4.600.617.000
Jumlah			7.776.428.000

*Peralatan dan Mesin
Rp.2.568.804.774,-*

C.3. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp 2,568.804.774,- dan Rp.2.529.883,774 . Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	2.529.883.774
Mutasi tambah:	
Pembelian	88.500.000
Transfer Masuk	27.480.000
Penghentian dari penggunaan	430.100
Mutasi kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan/Penghapusan	77.617.000
Saldo per 31 Desember 2024	2.568.676.874
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	2.039.881.069
Nilai Buku per 31 Desember 2024	528.795.805

Mutasi transaksi penambahan dalam periode ini adalah pembelian peralatan dan mesin dengan belanja modal dan transfer masuk dari Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI.

Mutasi transaksi pengurangan yaitu penghentian asset dari penggunaan.

*Gedung dan Bangunan
Rp.6.659.119.909*

C.4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.6.659.119.909,- dan Rp.6.659.119.909,- . Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	6.659.119.909
Mutasi tambah:	
Pengembangan Melalui KDP	-
Mutasi kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2024	6.659.119.909
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	
Nilai Buku per 31 Desember 2024	6.659.119.909

Aset Tetap lainnya
Rp.21.387.000

C.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 21.387.000 dan Rp. 21.387.000. Tidak terdapat mutasi Aset tetap lainnya.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.4.690.046.842

C.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp.4.690.046.842 dan Rp.4.211.880.182 . Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester II Tahun 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.568.804.774	2.039.881.069	528.923.705
2	Gedung dan Bangunan	6.659.119.909	2.650.165.773	4.008.954.136
Akumulasi Penyusutan		9.227.924.683	4.690.046.842	4.537.877.841

Aset Tak berwujud
Rp.35.000.000,-

C.7. Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 35.000.000 dan Rp. 35.000.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Tidak terdapat mutasi Aset tak berwujud.

Aset Lain-lain
Rp.77.617.000,-

C.8. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.77.617.000,- dan Rp.197.075.800. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Mutasi Tambah/Kurang berasal dari penghentian penggunaan. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Lain-Lain Semester II Tahun 2024

Saldo per 1 Januari 2024	197.075.800
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	119.454.800
Saldo per 31 Desember 2024	77.621.000
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	(77.621.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31

**Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset
Lainnya
(Rp.112.617.000,-)**

Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.112.617.000,- dan Rp.232.075.800,- . Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	35.000.000	(35.000.000)	0
2	Aset Lain-lain	77.621.000	(77.621.000)	0
Akumulasi Penyusutan		112.621.000	(112.621.000)	0

**Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.17.264.674,-**

C.10 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.17.264.674,- dan Rp.13.510.688 . Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Semester II TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
Utang kepada pihak ketiga	17.264.674	13.510.688
Total	17.264.674	13.510.688

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga:

Pada tahun 2024 terdapat kewajiban yang masih harus dibayar yaitu uang makan pegawai bulan Desember 2024, beban langganan air bulan Desember dan beban langganan telepon bulan Desember.

**Pendapatan
diterima dimuka
Rp2.737.875**

C.11 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.2.737.875,- dan Rp.501.250,- Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang diterima namun pendapatan tersebut belum diakui sebagai pendapatan penuh dalam periode tersebut karena sebagian masih menjadi hutang :

Rincian Uang Muka dari KPPN

Uraian	Jumlah
Pendapatan diterima dimuka	2.737.875
Total	2.737.875

Pendapatan diterima dimuka ini merupakan sewa pemanfaatan asset berupa tanah.

Ekuitas
Rp.12.317.233.792,-

C.12. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.12.317.233.792 dan Rp.12.768.288.563,- . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Catatan Penting Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

PNBP
Rp.16.109.665

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.16.109.665,- dan Rp.16.346.884,-

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp.3.002.747.582

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.3.002.747.582- dan Rp.2.736.583.122.,-

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 9.56 persen dibandingkan dengan Tahun 2023.

Realisasi belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp.3.002.747.582,- sedangkan tahun 2023 sebesar Rp.2.736.583.122,- Kenaikan tersebut karena adanya kenaikan gaji sesuai Perpres nomor 10 Tahun 2024 dan adanya penambahan pegawai mutasi juga CPNS .

Rincian Beban Pegawai Semester II TA 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban gaji pokok PNS	1.183.943.080	1.004.942.660	15,82
Beban pembulatan gaji PNS	17.355	16.916	2,60
Beban tunj.suami/istri	82.380.030	67.926.170	21,28
Beban tunj.anak	16.890.022	14.589.050	15,77
Beban tunj. Struktural	28.140.000	24.710.000	13,88
Beban tunj.fungsional	1.312.780.000	1.263.640.000	3,89
Beban tunj.pph	135.352.670	115.841.250	16,84
Beban tunj.beras	57.573.900	51.563.040	11,66
Beban uang makan	197.251.000	181.584.000	8,63
Beban tunj.umum PNS	8.420.000	11.770.000	(28,46)
Jumlah Belanja	3.002.748.067	2.736.583.086	9,73

**Beban
Persediaan**
Rp.54.456.000,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.54.456.000,- dan Rp.46.262.000

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 17.71 persen dibandingkan dengan Tahun 2023.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	54.456.000	46.262.000	17,71
Jumlah	54.456.000	46.262.000	17,71

**Beban Barang
dan Jasa**
Rp.663.262.662

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.663.262.662,- dan Rp.670.664.031,-

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1 persen dibandingkan dengan Tahun 2023. Realisasi belanja barang operasional lainnya, belanja langganan air, belanja pemeliharaan mengalami kenaikan sementara realisasi belanja honor operasional, belanja barang konsumsi, belanja langganan telepon mengalami penurunan

Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	571.286.800	564.962.480	1,12
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.956.480	4.351.500	(9,08)
Belanja Honor Operasional Satker	30.480.000	48.012.000	(36,52)
Belanja barang operasional lainnya	3.598.000	2.731.500	31,72
Belanja langganan telepon	1.259.452	1.330.951	(5,37)
Belanja langganan air	6.084.930	2.175.600	179,69
Belanja sewa	46.597.000	41.580.000	12,07
Belanja barang ekstakomptabel	-	5.520.000	(100,00)
Jumlah Belanja	663.262.662	670.664.031	(1,10)

**Beban
Pemeliharaan
Rp.507.902.288,-**

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.507.902.288 dan Rp.420.099.280,-

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 20 persen dibandingkan dengan Tahun 2023. Kenaikan terjadi semua akun.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	254.570.550	206.644.700	23,19
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	83.652.000	82.403.795	1,51
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	169.554.738	131.050.785	29,38
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	125.000		

**Beban Perjalanan
Dinas
Rp.51.201.339,-**

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.51.201.339,- dan Rp.41.850.932,-. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 22,34 persen. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	51.201.339	41.850.932	22,34
Jumlah	51.201.339	41.850.932	22,34

**Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp.555.225.660**

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.555.225.660,- dan Rp.561.018.529,-

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	175.746.618	181.539.491	(3,19)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	379.479.042	379.479.038	0,00
Beban penyusutan jaringan		1.044.324	
Jumlah Penyusutan	555.225.660	561.018.529	(1,03)
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	555.225.660	561.018.529	(1,03)

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset
Non Lancar
Rp.430.100

D.8 Surplus (Defisit) Pelepasan Aset

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.430.100,- dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	%
Penjualan Aset Non Lancar	430.100	0	-
Jumlah	0	0	-

Catatan Penting Laporan Operasional

Tidak ada catatan penting Laporan Operasional dituangkan dalam laporan keuangan Semester II TA 2024 ini.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.12.768.288.563,- dan Rp.13.064.702.859,-

Ekuitas Awal
Rp.12.768.288.563

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah sebesar (Rp.4.818.255.767,-) dan (Rp.4.460.131.010). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Surplus/Defisit LO
(Rp.4.818.255.767)

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi /Kesalahan
Mendasar Rp0

E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31

Koreksi Yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas

Rp0

Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp.4.367.200.996
,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.4.367.200.996,- dan Rp.4.167.379.237,-

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian/Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagikan ke Entitas Lain	4.358.497.386
Transfer Masuk	27.480.000
Diterima dari Entitas Lain	(18.776.390)
Jumlah	4.367.200.996

DDEL dan DKEL
Rp.(18.776.390)
dan Rp.
4.358.497.386

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp.4.358.497.386,-sedangkan DKEL sebesar Rp (18.776.390),-

Transfer Masuk
Rp.27.480.000,-

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2024 setelah penyusutan adalah sebesar Rp.27.480.000,-

Ekuitas Akhir
Rp.12.317.233.392

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.317.233.792,- dan Rp.12.768.288.563,-

Catatan Penting Laporan Perubahan Ekuitas

Tidak ada catatan penting Laporan Perubahan Ekuitas yang perlu dituangkan dalam laporan keuangan Semester II TA 2024 ini.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

*Kejadian Penting
Setelah Tanggal
Neraca*

F.1 Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Pada bulan Januari 2025 terdapat tagihan belanja air, telepon dan uang makan pegawai bulan Desember 2024 yang tagihannya baru terbit. Atas belanja tersebut dilakukan jurnal penyesuaian pada bulan Desember 2024 sehingga muncul akun 212111-Belanja pegawai yang Masih Harus Dibayar senilai Rp. 16.035.000 dan akun 212111 -Belanja Barang yang masih harus dibayar sebesar Rp.1.229.674,-

Pada bulan Januari 2025 terdapat juga pendapatan sewa diterima dimuka. Pendapatan sewa diterima dimuka tersebut adalah sewa atas pemanfaatan tanah negara. Atas pendapatan tersebut dilakukan jurnal penyesuaian pada bulan Desember 2024 sehingga muncul akun 219211-Pendapatan sewa diterima dimuka senilai Rp. 2.737.875,-

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG 098654

Tgl Data : 06/02/25 6:55 AM
Tgl Cetak : 06/02/25 2:01 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,366,880,000	4,358,497,386	(8,382,614)	100	4,179,321,000	4,162,637,621	16,683,379	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

SIDIKALANG, 6 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DANNY IRAWAN MANURUNG, S.KOM
NIP 198403092011011005

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (098654) PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Tgl Data : 06/02/25 12:26 PM
Tgl Cetak : 06/02/25 2:01 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	1,543,500	7,362,000	(5,818,500)	(79.03)
JUMLAH ASET LANCAR	1,543,500	7,362,000	(5,818,500)	(79.03)
ASET TETAP				
Tanah	7,776,428,000	7,776,428,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,568,804,774	2,529,883,774	38,921,000	1.54
Gedung dan Bangunan	6,659,119,909	6,659,119,909	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	21,387,000	21,387,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,690,046,842)	(4,211,880,182)	(478,166,660)	11.35
JUMLAH ASET TETAP	12,335,692,841	12,774,938,501	(439,245,660)	(3.44)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	35,000,000	35,000,000	0	0.00
Aset Lain-lain	77,617,000	197,075,800	(119,458,800)	(60.62)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(112,617,000)	(232,075,800)	119,458,800	(51.47)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	12,337,236,341	12,782,300,501	(445,064,160)	(3.48)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	17,264,674	13,510,688	3,753,986	27.79
Pendapatan Diterima Dimuka	2,737,875	501,250	2,236,625	446.21
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	20,002,549	14,011,938	5,990,611	42.75
JUMLAH KEWAJIBAN	20,002,549	14,011,938	5,990,611	42.75
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	12,317,233,792	12,768,288,563	(451,054,771)	(3.53)
JUMLAH EKUITAS	12,317,233,792	12,768,288,563	(451,054,771)	(3.53)
JUMLAH EKUITAS	12,317,233,792	12,768,288,563	(451,054,771)	(3.53)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12,337,236,341	12,782,300,501	(445,064,160)	(3.48)

Keterangan :

FINAL

SIDIKALANG, 6 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DANNY IRAWAN MANURUNG, S.KOM
NIP 198403092011011005

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
 SATUAN KERJA : (098654) PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Tgl Data : 06/02/25 12:26 PM

Tgl Cetak : 06/02/25 2:01 PM


Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	4,358,497,386
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	18,776,390	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	430,100
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	18,346,290
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,163,943,080	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17,355	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	82,380,030	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	16,890,022	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28,140,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,312,780,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	135,352,670	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	57,573,900	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	194,402,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	8,420,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	571,286,800	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,956,480	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	30,480,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3,598,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	48,762,500	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,242,096	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	5,197,300	0
3.0	522141	Belanja Sewa	46,597,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	254,570,550	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	83,652,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	169,554,738	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51,201,339	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88,500,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	474
JUMLAH			4,377,274,250	4,377,274,250

Keterangan :

FINAL


 SIDIKALANG, 6 Februari 2025
 Penanggung Jawab UAKPA
 KUNDA PENGUNTA ANGGARAN
 BANNY IRAWAN MANURUNG, S.KOM
 198403092011011005

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (098654) PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Tgl Data : 06/02/25 6:55 AM

Tgl Cetak : 06/02/25 2:01 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi		
0.0	131111	Tanah	1,543,500	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	7,776,428,000	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,568,804,774	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	6,659,119,909	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	21,387,000	0
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,039,881,069
0.0	162151	Software	0	2,650,165,773
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	35,000,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	77,617,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	77,617,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	35,000,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	16,035,000
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	1,229,674
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,737,875
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	0	4,358,497,386
0.0	313221	Transfer Masuk	18,776,390	0
0.0	391111	Ekuitas	0	27,480,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	12,768,288,563
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	430,100
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	0	16,109,665
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	1,163,943,080	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	16,881	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	82,380,030	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	16,890,022	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	28,140,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,312,780,000	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	135,352,670	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	57,573,900	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	197,251,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	8,420,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	571,286,800	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	3,956,480	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	30,480,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	3,598,000	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,259,452	0
3.0	522141	Beban Sewa	6,084,930	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46,597,000	0
			254,570,550	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (098654) PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Tgl Data : 06/02/25 6:55 AM

Tgl Cetak : 06/02/25 2:01 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	83,652,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	169,554,738	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	51,201,339	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	175,746,618	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	379,479,042	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	54,456,000	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	125,000	0
JUMLAH			21,993,472,105	21,993,472,105

Keterangan :

FINAL

PENGADILAN NEGERI
SIDIKALANG, 6 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KEASA PENGGUNA ANGGARAN

DANNY IRAWAN MANURUNG, S.KOM
NIP. 198403092011011005

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
 SATUAN KERJA : (098654) PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Tgl Data : 06/02/25 12:26 PM

Tgl Cetak : 06/02/25 2:01 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	12,768,288,563	13,064,702,859	(296,414,296)	(2.27)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,818,255,767)	(4,460,131,010)	(358,124,757)	8.03
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(3,662,523)	3,662,523	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(3,662,523)	3,662,523	(100)
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,367,200,996	4,167,379,237	199,821,759	4.79
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(451,054,771)	(296,414,296)	(154,640,475)	52.17
EKUITAS AKHIR	12,317,233,792	12,768,288,563	(451,054,771)	(3.53)

Keterangan :

FINAL

SIDIKALANG, 6 Februari 2025
 Penanggung Jawab UAKPA
 WAKIL PENGGUNA ANGGARAN

 DANNY IRAWAN MANURUNG, S.KOM
 NIP. 198403092011011005

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (098654) PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Tgl Data : 06/02/25 6:55 AM

Tgl Cetak : 06/02/25 2:01 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	16,109,665	16,346,884	(237,219)	(1.451)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	16,109,665	16,346,884	(237,219)	(1.451)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	16,109,665	16,346,884	(237,219)	(1.451)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,002,747,583	2,736,583,122	266,164,461	9.726
Beban Persediaan	54,456,000	46,262,000	8,194,000	17.712
Beban Barang dan Jasa	663,262,662	670,664,031	(7,401,369)	(1.104)
Beban Pemeliharaan	507,902,288	420,099,280	87,803,008	20.901
Beban Perjalanan Dinas	51,201,339	41,850,932	9,350,407	22.342
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (098654) PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Tgl Data : 06/02/25 6:55 AM
Tgl Cetak : 06/02/25 2:01 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	555,225,660	561,018,529	(5,792,869)	(1.033)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,834,795,532	4,476,477,894	358,317,638	8.004
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,818,685,867)	(4,460,131,010)	(358,554,857)	8.039
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	430,100	0	430,100	
Pendapatan Pelepasan Aset	430,100	0	430,100	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	430,100	0	430,100	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,818,255,767)	(4,460,131,010)	(358,124,757)	8.029
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,818,255,767)	(4,460,131,010)	(358,124,757)	8.029

Keterangan :

FINAL



SIDIKALANG, 6 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DANNY IRWAN MANURUNG, S.KOM

NIP 198403092011011005

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 098654 PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Tgl Data : 12/02/25 8:08 AM
Tgl Cetak : 12/02/25 9:30 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah		7,788	7,776,428,000	0	0	0	7,776,428,000
20101	TANAH PERSIL	-	7,788	7,776,428,000	0	0	0	7,776,428,000
132111	Peralatan dan Mesin		505	2,568,804,774	(1,941,193,451)	(98,687,618)	(2,039,881,069)	528,923,705
30103	ALAT BANTU	-	1	24,900,000	(24,900,000)	0	(24,900,000)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	7	322,296,734	(322,296,734)	0	(322,296,734)	0
30501	ALAT KANTOR	-	53	226,829,200	(157,467,200)	(1,658,000)	(159,125,200)	67,704,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	354	714,583,320	(610,634,186)	(8,933,324)	(619,567,510)	95,015,810
30601	ALAT STUDIO	-	14	116,921,220	(78,330,346)	(11,749,964)	(90,080,310)	26,840,910
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	1	3,000,000	(3,118,000)	118,000	(3,000,000)	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	2	196,150,000	(10,900,000)	(19,500,000)	(30,400,000)	165,750,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	44	648,240,760	(493,933,695)	(52,932,830)	(546,866,525)	101,374,235
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	28	270,883,540	(237,363,290)	468,500	(236,894,790)	33,988,750
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	-	1	45,000,000	(2,250,000)	(4,500,000)	(6,750,000)	38,250,000
133111	Gedung dan Bangunan		19	6,659,119,909	(2,270,686,731)	(379,479,042)	(2,650,165,773)	4,008,954,136
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	6	4,128,364,909	(1,500,874,202)	(251,176,950)	(1,752,051,152)	2,376,313,757
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	13	2,530,755,000	(769,812,529)	(128,302,092)	(898,114,621)	1,632,640,379
135121	Aset Tetap Lainnya		988	21,387,000	0	0	0	21,387,000
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	988	21,387,000	0	0	0	21,387,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		274	77,617,000	(197,075,800)	119,458,800	(77,617,000)	0
30103	ALAT BANTU	-	0	0	(908,000)	908,000	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	1	558,000	(14,558,000)	14,000,000	(558,000)	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	0	0	(15,000)	15,000	0	0
30501	ALAT KANTOR	-	48	6,490,000	(45,964,000)	39,474,000	(6,490,000)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	208	38,185,000	(109,000)	(38,076,000)	(38,185,000)	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	9	118,000	0	(118,000)	(118,000)	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	2	20,900,000	(135,521,800)	114,621,800	(20,900,000)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	6	11,366,000	0	(11,366,000)	(11,366,000)	0
JUMLAH			9,574	17,103,356,683	(4,408,955,982)	(358,707,860)	(4,767,663,842)	12,335,692,841

Sidikalang, 12 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Danny Irawan Manurung, S.Kom
198403092011011005

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 098654 PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Tgl Data : 12/02/25 8:08 AM
Tgl Cetak : 12/02/25 9:30 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		32	14,016,150	(6,907,845)	(1,873,230)	(8,781,075)	5,235,075
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	31	13,866,150	(6,757,845)	(1,873,230)	(8,631,075)	5,235,075
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	1	150,000	(150,000)	0	(150,000)	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	(545,000)	545,000	0	0
30501	ALAT KANTOR	-	0	0	(440,000)	440,000	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	0	0	(105,000)	105,000	0	0
JUMLAH			32	14,016,150	(7,452,845)	(1,328,230)	(8,781,075)	5,235,075

Sidikalang, 12 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Danny Irawan Manurung, S.Kom
198403092011011005

**LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

UAPA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 098654 PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Tgl Data : 12/02/25 8:08 AM
Tanggal : 12/02/25 9:31 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_satker_

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG			SALDO 31 DESEMBER 2024					
KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
162151	Software		2	35,000,000	(35,000,000)	0	(35,000,000)	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	2	35,000,000	(35,000,000)	0	(35,000,000)	0
JUMLAH			2	35,000,000	(35,000,000)	0	(35,000,000)	0

Sidikalang, 12 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Danny Irawan Manurung, S.Kom
198403092011011005

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Tgl Data : 03/03/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 05/02/25 3:12 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poc

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 098654 PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		7,788	7,776,428,000	0	0	0	0	7,788	7,776,428,000
20101	TANAH PERSIL	-	7,788	7,776,428,000	0	0	0	0	7,788	7,776,428,000
132111	Peralatan dan Mesin		792	2,543,899,924	19	129,980,000	274	91,059,000	537	2,582,820,924
30103	ALAT BANTU	-	1	24,900,000	0	0	0	0	1	24,900,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	7	322,296,734	1	14,000,000	1	14,000,000	7	322,296,734
30501	ALAT KANTOR	-	91	161,219,200	10	72,100,000	48	6,490,000	53	226,829,200
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	591	750,234,470	2	16,400,000	208	38,185,000	385	728,449,470
30601	ALAT STUDIO	-	14	116,921,220	0	0	0	0	14	116,921,220
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	10	3,118,000	0	0	9	118,000	1	3,000,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	2	196,150,000	0	0	0	0	2	196,150,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	1	150,000	0	0	0	0	1	150,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	46	669,140,760	0	0	2	20,900,000	44	648,240,760
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	28	254,769,540	6	27,480,000	6	11,366,000	28	270,883,540
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	-	1	45,000,000	0	0	0	0	1	45,000,000
133111	Gedung dan Bangunan		19	6,659,119,909	0	0	0	0	19	6,659,119,909
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	6	4,128,364,909	0	0	0	0	6	4,128,364,909
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	13	2,530,755,000	0	0	0	0	13	2,530,755,000
135121	Aset Tetap Lainnya		988	21,387,000	0	0	0	0	988	21,387,000
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	988	21,387,000	0	0	0	0	988	21,387,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		87	197,620,800	274	91,059,000	87	211,062,800	274	77,617,000
30103	ALAT BANTU	-	1	908,000	0	0	1	908,000	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	2	14,558,000	1	14,000,000	2	28,000,000	1	558,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	1	15,000	0	0	1	15,000	0	0
30501	ALAT KANTOR	-	61	46,404,000	48	6,490,000	61	46,404,000	48	6,490,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	6	214,000	208	38,185,000	6	214,000	208	38,185,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	0	0	9	118,000	0	0	9	118,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	16	135,521,800	2	20,900,000	16	135,521,800	2	20,900,000
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	0	0	6	11,366,000	0	0	6	11,366,000
TOTAL				17,198,455,633		221,039,000		302,121,800		17,117,372,833

Sidikalang, 5 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Danny Irawan Manurung, S.Kom
198403092011011005



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 098654
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	4,366,880,000	4,366,880,000	0
2	Belanja	4,358,497,860	4,358,497,860	0
3	Pengembalian Belanja	-474	-474	0
4	Estimasi Pendapatan	14,094,000	14,094,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	18,776,390	18,776,390	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 06-FEB-25



MEMO PENYESUAIAN


Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung RI
 Esolen I : Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : Sumatera Utara
 Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Sidikalang
 No. Dokumen : Kartu Belanja yang masih harus dibayar
 Tanggal Dokumen : 31-12-2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Belanja yang masih harus dibayar

Kategori Jurnal Penyelesaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka	<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/> Pendapatan yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka	<input type="checkbox"/> Beban selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	


NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN NAMA AKUN	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	511129	Beban Uang Makan	16.035.000	
	K	212112	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		16.035.000
2	D	522112	Beban Langganan Telepon	123.044	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		123.044
3	D	522113	Beban Langganan Air	1.106.630	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		1.106.630

Dibuat Oleh : Kasubbag Umum dan Keuangan



 Redia Sianturi, S.E
 Tanggal : 31 Desember 2024



Disetujui : Sekretaris


 Anny Irawan Manurung, S.Kom
 Tanggal : 31 Desember 2024

Direkam : Operator Modul GLP


 Redia Sianturi, S.E
 Tanggal : 31 Desember 2024

atas memo penyesuaian di atas petugas akuntansi satker Pengadilan Negeri Sidikalang menginput pada aplikasi SAKTI pada menu Pelaporan dan Akuntansi "Belanja Yang Masih Harus Dibayar".

**KARTU RINCIAN NILAI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR)
Per 31 Desember 2024**

K/L : (005) Mahkamah Agung
 BAES1 : (005.01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (0700) Sumatera Utara
 Satuan Kerja : (098654) Pengadilan Negeri Sidikalang

No	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	SATKER	TA	AKUN	URAIAN	BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	DOKUMEN SUMBER	KETERANGAN
1	0700	Sumatera Utara	098654	Pengadilan Negeri Sidikalang	2024	511129	Belanja Gaji Lainnya	16.035.000	SPM Uang Makan Pegawai di Bulan Desember 2024	Beban Uang makan pegawai di bulan Desember yang dibayar di Bulan Januari
2	0700	Sumatera Utara	098654	Pengadilan Negeri Sidikalang	2024	522112	Belanja Langganan Telepon	123.044	SPM Tanggal 13 Januari 2025	Beban Langganan Telepon Bulan Desember 2024
3	0700	Sumatera Utara	098654	Pengadilan Negeri Sidikalang	2024	522113	Belanja Langganan Air	1.106.630	REKENING TAGIHAN AIR TANGGAL 16 JANUARI 2024	Beban Langganan Air Bulan Desember 2024
JUMLAH TOTAL								17.264.674		



Sidikalang, 22 Januari 2025
 Sekretaris Pengadilan Negeri Sidikalang

DANNY IRAWAN MANURUNG, S.Kom
 NIP 198403092011011005

MEMO PENYESUAIAN


Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung RI
 Esolen I : Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : Sumatera Utara
 Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Sidikalang
 No. Dokumen : Kartu Pendapatan Diterima Dimuka
 Tanggal Dokumen : 31-12-2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Pendapatan Diterima Dimuka

Kategori Jurnal Penyelesaian

<input checked="" type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/>	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Belanja yang Masih Harus dibayar	<input type="checkbox"/>	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan		


NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN NAMA AKUN	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	2.737.875	
	K	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka		2.737.875

Dibuat Oleh : Kasubbag Umum dan Keuangan


 Redia Sianturi, S.E
 Tanggal : 31 Desember 2024



Disetujui : Sekretaris


 Danny Irawan Manurung, S.Kom
 Tanggal : 31 Desember 2024

Direkam : Operator Modul GLP


 Redia Sianturi, S.E
 Tanggal : 31 Desember 2024

atas memo penyesuaian di atas petugas akuntansi satker Pengadilan Negeri Sidikalang menginput pada aplikasi SAKTI pada menu penyesuai Kategori " Pendapatan Diterima Dimuka".

**KARTU RINCIAN NILAI PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
per 31 Desember 2024**

K/L : (005) Mahkamah Agung
 BAES1 : Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : Sumatera Utara
 Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Sidikalang

No.	Uraian	Nilai SSBP	Jangka Waktu (Bulan)	Sewa Perbulan	TMT	Jatuh Tempo	Daluwarsa			Total	Pendapatan Diterima di Muka
							s.d 31 Desember 2024	s.d 31 Desember 2025	s.d 30 September 2026		
1	Sewa Kantin	3.129.000	24	130.375	30-Sep-24	30-Sep-26	391.125	1.564.500	1.173.375	3.129.000	2.737.875
		3.129.000									

Sidikalang, 16 Januari 2025
 Sekretaris Pengadilan Negeri Sidikalang



(Handwritten Signature)

Danny Irawan Manurung, S.Kom
 NIP 198403092011011005

MEMO PENYESUAIAN


Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung RI
 Esolen I : Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : Sumatera Utara
 Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Sidikalang
 No. Dokumen : Kartu Belanja yang masih harus dibayar
 Tanggal Dokumen : 31-12-2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Koreksi SPM

Kategori Jurnal Penyelesaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka	<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/> Pendapatan yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka	<input type="checkbox"/> Beban selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input checked="" type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN NAMA AKUN	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522141	Beban Sewa	7.560.000	
	K	523119	Beban Pemeliharaan Gedung Bangunan Lainnya		7.560.000

Dibuat Oleh : Kasubbag Umum dan Keuangan


 Redia Sianturi, S.E
 Tanggal : 31 Desember 2024



Disetujui : Sekretaris


 Anny Irawan Manurung, S.Kom
 Tanggal : 31 Desember 2024

Direkam : Operator Modul GLP


 Redia Sianturi, S.E
 Tanggal : 31 Desember 2024

atas memo penyesuaian di atas petugas akuntansi satker Pengadilan Negeri Sidikalang menginput pada aplikasi SAKTI pada menu Pelaporan dan Akuntansi "Belanja Yang Masih Harus Dibayar".

KARTU RINCIAN KOREKSI SPM
Per 31 Desember 2024

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 : (005.01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (0700) Sumatera Utara
Satuan Kerja : (098654) Pengadilan Negeri Sidikalang

No	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	SATKER	TA	AKUN	URAIAN	BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	DOKUMEN SUMBER	KETERANGAN
1	0700	Sumatera Utara	098654	Pengadilan Negeri Sidikalang	2024	522141	Beban Sewa	7.560.000	SPM Koreksi	Koreksi SPM atas kesalahan akun pembebanan beban sewa pada beban pemeliharaan gedung
JUMLAH TOTAL								7.560.000		



Sidikalang, 05 Februari 2025
Sekretaris Pengadilan Negeri Sidikalang

DANNY IRAWAN MANURUNG, S.Kom
NIP 198403092011011005

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00003A

Tanggal 10-Jan-2025

Halaman 1 dari 3

Kuasa Bendahara Umum KPPN Sidikalang (119)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 14.504.800,00

**** EMPAT BELAS JUTA LIMA RATUS EMPAT RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2025
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-005.01.2.098654/2025

Tanggal : 02-Dec-2024
UU NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG APBN 2025

Jenis Tagihan : GAJI LAINNYA
Jatuh Tempo : Segera
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
098654.119.511129.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0707.2.000000.000000	15.215.000,00
Jumlah Pengeluaran	15.215.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
663491.119.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0702.2.000000.000000	710.200,00
Jumlah Potongan	710.200,00
TOTAL PEMBAYARAN	14.504.800,00

Kepada:

Nomor : 838504	Bank / Pos : TERLAMPIR
Nama Supplier : PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG	Rekening : TERLAMPIR
NPWP1 : 0001093244128000	Nama Pemilik : TERLAMPIR
NPWP2 : 0001093244128000	Uraian : Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PNS bulan Desember 2024 untuk 24 Pegawai
NOP :	
ALAMAT : Jl. Ahmad Yani No.133	

Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|NTgyMjEzNTk=

Sidikalang, 10 Januari 2025

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



KEDIA SIAN I URI
NIP 198607292019032004

**MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor : 00003A

Tanggal : 10-Jan-2025

Halaman 2 dari 3

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	ANINTA SEROJA SEMBIRING, SH 147301000814504 357949759121000	597.550,00	BANK RAKYAT INDONESIA ANINTA SEROJA SEMBIRING
2	ATIKA CINDY SIMANJUTAK, A.MD 036701087166506 967640608122000	562.400,00	BANK RAKYAT INDONESIA ATIKA CINDY SIMANJUTAK
3	DANNY IRAWAN MANURUNG, S.KOM 019401098739505 592833586125000	492.100,00	BANK RAKYAT INDONESIA DANNY IRAWAN MANURUNG
4	DARIAMAN SARAGIH 019401098743504 770539351128000	703.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA DARIAMAN SARAGIH
5	DEWI SUNARTI GIRSANG, S.E. 537701024386539 967639949128000	632.700,00	BANK RAKYAT INDONESIA DEWI SUNARTI GIRSANG
6	DIMAS ARI WICAKSONO, SH. 019401098738509 841132178008000	703.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA DIMAS ARI WICAKSONO
7	ELJON GULTOM 019401029472508 770539385128000	703.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA ELJON GULTOM
8	EVARINA SIHOMBING, SH.,MH. 008501016943505 576781942003000	418.200,00	BANK RAKYAT INDONESIA EVA RINA SIHOMBING,SH
9	FRANSLONDO OMPUSUNGGU, SH 019401098742508 543807598128000	632.700,00	BANK RAKYAT INDONESIA FRANSLONDO OMPUSUNGGU
10	GUNTUR FRANS GERRI, SH. 122301000349566 805976818061000	527.250,00	BANK RAKYAT INDONESIA GUNTUR FRANS GERRI
11	HERMANTO PANDIANGAN 019401098741502 770539443128000	597.550,00	BANK RAKYAT INDONESIA HERMANTO PANDIANGAN
12	JOHANNES EDISON HAHOLONGAN, SH 207501011310504 812794121017000	421.800,00	BANK RAKYAT INDONESIA JOHANNES EDISON HAHOLONGAN
13	JONSON ENOS EVRINANDO PANJAITAN, 488801013112507 835053760128000	665.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA JONSON ENOS EVRINANDO PANJAITAN
14	LASNIDA SIMBOLON,A.MD 526901023742535 960359172127000	665.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA LASNIDA SIMBOLON
15	LINA SURYANI NASUTION,S.H 019401081410500 718654619125000	632.700,00	BANK RAKYAT INDONESIA LINA SURYANI NASUTION
16	MEILAN MONANITA 028301022036506 361615933114000	597.550,00	BANK RAKYAT INDONESIA MEILAN MONANITA
17	MELVA MEGA NANDA, S.H 063801046420506 912384237114000	456.950,00	BANK RAKYAT INDONESIA MELVA MEGA NANDA
18	NELSON ROBERTH SARAGIH, SH.,MH 147301000022505 671294551124000	456.950,00	BANK RAKYAT INDONESIA NELSON ROBERTH
19	REDIA SIANTURI, S.E. 019401064582504 571922889118000	703.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA REDIA SIANTURI

**MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor : 00003A

Tanggal : 10-Jan-2025

Halaman 3 dari 3

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
20	RIRIS FATMAWATI PANJAITAN, SH 525201010287537 911509263127000	703.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA RIRIS FATMAWATI PANJAITAN
21	RONAL JEKSON MARPAUNG, A.MD. 033601025924533 843658998225000	665.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA RONAL JEKSON MARPAUNG
22	RUMIA ROTUA ANNE CHRISTINA 763501005889532 840975270117000	597.550,00	BANK RAKYAT INDONESIA RUMIA ROTUA ANNE C LUMBANRAJA
23	VERONICA ANISA YANUARI 019401098740506 770539393128000	667.850,00	BANK RAKYAT INDONESIA VERONICA AY SITORUS
24	YUHENI TARIDA KENDAL 732401027782537 638665414125000	703.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA YUHENI TARIDA KENDAL SIMANGUNSONG
JUMLAH		14.504.800,00	

Sidikalang, 10 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



REDIA SIANTURI
NIP 198607292019032004

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00003A

Tanggal : 10-Januari-2025

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
098654.119.511129.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0707.2.000000.000000		
1	994.001.0A.000023-Belanja Uang Makan PNS	15.215.000,00
	Jumlah	15.215.000,00
Jumlah		15.215.000,00

Sidikalang
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

REDIA SIANTURI
NIP 198607292019032004

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00004A

Tanggal 10-Jan-2025

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Sidikalang (119)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 697.000,00

**** ENAM RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2025
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-005.01.2.098654/2025
Tanggal : 02-Dec-2024
UU NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG APBN 2025

Jenis Tagihan : GAJI LAINNYA
Jatuh Tempo : Segera
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
098654.119.511129.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0707.2.000000.000000	820.000,00
Jumlah Pengeluaran	820.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
663491.119.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0702.2.000000.000000	123.000,00
Jumlah Potongan	123.000,00
TOTAL PEMBAYARAN	697.000,00

Kepada:

Nomor : 838504
Nama Supplier : PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
NPWP1 : 0001093244128000
NPWP2 : 0001093244128000
NOP :
ALAMAT : Jl. Ahmad Yani No.133

Bank / Pos : TERLAMPIR
Rekening : TERLAMPIR
Nama Pemilik : TERLAMPIR
Uraian : Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PNSbulan Desember 2024 untuk 1 Pegawai

Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|NTgyMjEyMTk=

Sidikalang, 10 Januari 2025

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



KEDIA SIAN I URI
NIP 198607292019032004

**MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor : 00004A

Tanggal : 10-Jan-2025

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	MHD.IQBAL FAHRI JUNEIDY PURBA,SH 7194640034 098946312121000	697.000,00	BANK SYARIAH INDONESIA MHD.IQBAL FAHRI JUNEIDY PURBA,SH
JUMLAH		697.000,00	

Sidikalang, 10 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



REDIA SIANTURI
NIP 198607292019032004

**MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor SPM : 00004A

Tanggal : 10-Januari-2025

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
098654.119.511129.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0707.2.000000.000000		
1	994.001.0A.000023-Belanja Uang Makan PNS	820.000,00
	Jumlah	820.000,00
Jumlah		820.000,00

Sidikalang
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

REDIA SIANTURI
NIP 198607292019032004

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00006A

Tanggal 13-Jan-2025

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Sidikalang (119)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 500.444,00

**** LIMA RATUS RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2025
Dasar Pembayaran
DIPA No. : DIPA-005.01.2.098654/2025
Tanggal : 02-Dec-2024
UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG
APBN 2025

Jenis Tagihan : NON GAJI
Jatuh Tempo : 17-Jan-2025
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

098654.119.521111.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0707.2.000000.000000 377.400,00

098654.119.522112.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0707.2.000000.000000 123.044,00

Jumlah Pengeluaran 500.444,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan 0,00

TOTAL PEMBAYARAN

500.444,00

Kepada:

Nomor : 2536 Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK Rekening : 120101000014303
NPWP1 : 0010000131093000 Nama Pemilik : PT TELKOM INDONESIA ENTERPRISE
NPWP2 : 0001093244128000 Alamat : Jl. Kebon Sirih No.12
NOP :
Uraian : Pembayaran belanja barang berupa tagihan telepon bulan Januari 2025 untuk 3 invoice

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

Sidikalang, 13 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|NTgyNjY30TU=

REDIA SIANTURI
NIP 198607292019032004

DAFTAR RINCIAN TAGIHAN

Nomor : 00006A

Tanggal : 13-Jan-2025

Halaman 2 dari 2

No	No Meter / No Telepon Nama Pelanggan	Periode Tagihan	Nilai Tagihan
1	062721953 PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG	2025-01	54.057,00
2	111353151840 PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG	2025-01	377.400,00
3	062721053 PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG	2025-01	68.987,00
JUMLAH			500.444,00

**MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor SPM : 00006A

Tanggal : 13-Januari-2025

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
098654.119.521111.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0707.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000042-Langgan Jasa Internet (Bandwith)	377.400,00
	Jumlah	377.400,00
098654.119.522112.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0707.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000045-Langgan Telepon	123.044,00
	Jumlah	123.044,00
Jumlah		500.444,00

Sidikalang
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

REDIA SIANTURI
NIP 198607292019032004

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00081A

Tanggal 08-Agu-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Sidikalang (119)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 18.467.000,00

**** DELAPAN BELAS JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024
Dasar Pembayaran
DIPA No. : DIPA-005.01.2.098654/2024
Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
APBN 2024

Jenis Tagihan : KOREKSI GUP
Jatuh Tempo : Segera
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

098654.119.522141.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0707.2.000000.000000	7.560.000,00
098654.119.523111.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0707.2.000000.000000	3.952.000,00
098654.119.523119.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0707.2.000000.000000	3.955.000,00
098654.119.523121.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0707.2.000000.000000	3.000.000,00

Jumlah Pengeluaran

18.467.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

	0,00
--	------

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

18.467.000,00

Kepada:

Nomor : 838504
Nama Supplier : PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
NPWP1 : 0001093244128000
NPWP2 : 0001093244128000
NOP :
Uraian : Penggantian Uang Persediaan (RM) untuk Keperluan Belanja Barang

Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Rekening : 653250986541000
Nama Pemilik : BPG 119 PN SIDIKALANG 01
Alamat : Jl. A. Yani No. 133

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

Sidikalang, 08 Agustus 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|NDY1NTExNjE=

REDIA SIANTURI
NIP 198607292019032004

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
KOREKSI COA DETAIL 16 SEGMENT

Nomor SPM : 00081A

Tanggal : 08-Agustus-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai Awal	Nilai Baru
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian		
PENGELUARAN			
098654.119.522141.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0707.2.000000.000000			
1	994.002.0H.000067-Bantuan Sewa Rumah Dinas	0,00	7.560.000,00
	Jumlah	0,00	7.560.000,00
098654.119.523111.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0707.2.000000.000000			
1	994.002.0C.000042-Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Sumatera Utara)	3.952.000,00	3.952.000,00
	Jumlah	3.952.000,00	3.952.000,00
098654.119.523119.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0707.2.000000.000000			
1	994.002.0C.000044-Pemeliharaan Rumah Dinas (13 Unit)	11.515.000,00	3.955.000,00
	Jumlah	11.515.000,00	3.955.000,00
098654.119.523121.00501WA.6986EBA.A000000001.00000.2.0707.2.000000.000000			
1	994.002.0C.000046-Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Sumatera Utara)	3.000.000,00	3.000.000,00
	Jumlah	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL PENGELUARAN		18.467.000,00	18.467.000,00
POTONGAN			
	Jumlah	0,00	0,00
TOTAL POTONGAN		0,00	0,00

Sidikalang
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



REDIA SIANTURI
NIP 198607292019032004

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.



STRUK PEMBAYARAN PERUMDA AIR MINUM LAE NCIHO



DETAIL TRANSAKSI

Tanggal Bayar : 2025-01-20 20/01/2025 10:38:37
Lokasi Trx : SIMPANG SALAK
Kode user : ANIKA BANCIN

RINCIAN DATA TRANSAKSI

Instansi : PERUMDA AIR MINUM LAE NCIHO
ID Pelanggan : 010800711
Nama Pelanggan : KANTOR PENGADILAN NEGERI
Alamat : SIMPANG SALAK
Meteran : 5055-5235
Periode Tagihan : 202412
Golongan : IP
Pemakaian : 180

Tagihan Air	: Rp.	1.091.130
Interkoneksi	: Rp.	2.500
Biaya Admin	: Rp.	2.500
Jasa Pemeliharaan	: Rp.	10.500
Non Air	: Rp.	0
Cicilan	: Rp.	0
Total Tagihan Air	: Rp.	1.106.630

TERBILANG : Satu Juta Seratus Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh

**Struk Ini Merupakan Bukti Bayar Yang Sah
Pembayaran lewat dari tanggal 20 akan dikenakan denda**



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Jalan Ahmad Yani Nomor 133 Sidikalang, Kab. Dairi
Sumatera Utara. www.pn-sidikalang.go.id, info@pn-sidikalang.go.id

PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA SEBAGIAN TANAH, GEDUNG DAN BANGUNAN BARANG
MILIK NEGARA (BMN)

ANTARA
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
DENGAN
VICTOR HAMONANGAN SIMANJUNTAK
No : 1510/W2.U14/PL.01/IX/2024

Pada hari ini, hari Senin tanggal 30 bulan September tahun 2024, bertempat di Pengadilan Negeri Sidikalang yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Danny Irawan Manurung, S.Kom Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Sidikalang, berkedudukan dan berkantor di Pengadilan Negeri Sidikalang alamat Jalan Ahmad Yani No 133 Sidikalang Kabupaten Dairi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Sidikalang selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".
- II. Nama : Victor Hamonangan Simanjuntak, Jabatan : PPNPN , berkedudukan dan berkantor di Pengadilan Negeri Sidikalang alamat Jalan Ahmad Yani No 133 Sidikalang Kabupaten Dairi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseorangan/Organisasi/Badan Hukum, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", terlebih dahulu menjelaskan:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah pemegang hak yang sah atas sebagian tanah, gedung dan bangunan yang dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseorangan/Organisasi/Badan Hukum yang memanfaatkan sebagian tanah, gedung dan bangunan dari PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Sewa-Menyewa sebagian tanah, gedung dan bangunan Barang Milik Negara (BMN) untuk dimanfaatkan sebagai Kantin, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
PENGERTIAN UMUM

Dalam PERJANJIAN yang dimaksud dengan:

1. Hari Kerja berarti hari selain hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur resmi nasional di Indonesia pada saat Bank Indonesia dan atau bank-bank lain beroperasi dan melakukan kegiatan kliring antar bank dan/atau pembayaran.

2. Hari Kalender berarti termasuk pula hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur resmi nasional.
3. Objek Sewa adalah sebagian tanah, seluas **32 M²** milik PIHAK KESATU yang disewakan kepada PIHAK KEDUA.
4. Jangka Waktu Sewa berarti jangka waktu sebagaimana disepakati oleh PARA PIHAK dalam pasal 4 dimana PIHAK KEDUA dapat menggunakan Objek Sewa dan dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK dengan kesepakatan tertulis.
5. "Harga Sewa" adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU atas Objek Sewa, berdasarkan Surat Keputusan Pelaksanaan Sewa dari Sekretaris Mahkamah Agung dengan mempertimbangkan persetujuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KEDUA bermaksud menyewa Objek Sewa dari PIHAK KESATU untuk kegiatan usaha bisnis yaitu Kantin . PIHAK KESATU menyetujui maksud PIHAK KEDUA untuk menyewakan Objek Sewa selama Jangka Waktu Sewa.

PASAL 3 OBJEK SEWA

1. Status Kepemilikan Objek Sewa :
Sebagian Tanah : Berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 yang terletak di Jalan Ahmad Yani No 133 Sidikalang, diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 24/1981/I tanggal 23 Juli 1981 seluas 32 M² dari 4.011M²., terdaftar atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MAHKAMAH AGUNG RI.
2. Alamat Objek Sewa : Jalan Ahmad Yani No 133 , Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kota Sidikalang, Provinsi Sumatera Utara.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa Objek Sewa mencakup sebagian dari tanah seluas 32 M², dengan batas-batas yang ditentukan oleh para pihak.
4. Objek Sewa sebagaimana butir Ayat 3 di atas hanya dapat dimanfaatkan untuk Kantin.

PASAL 4 JANGKA WAKTU SEWA

1. Jangka Waktu Sewa berdasarkan Perjanjian ini telah disepakati oleh PARA PIHAK yaitu selama (2) tahun, terhitung sejak tanggal **30 September 2024** sampai dengan tanggal **30 September 2026**.
2. Perpanjangan sewa oleh PIHAK KEDUA dapat dilakukan melalui perjanjian baru dengan mengajukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.



PASAL 5
BESARAN SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Besaran sewa sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1253/SEK/SK.PL1.2/IX/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Pengadilan Negeri Sidikalang

Besaran Sewa terdiri atas:

- a. Biaya Sewa Sebagian Tanah sebesar Rp. 2.409.000 (dua juta empat ratus Sembilan ribu rupiah)
- b. Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Air) sebesar Rp. 720.000 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan pembayaran dilakukan sekaligus Sejak dikeluarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1253/SEK/SK.PL1.2/IX/2024 tanggal 24 September 2024.

2. PARA PIHAK sepakat bahwa Harga Sewa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU disertai dengan penyerahan dokumen dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yaitu berupa:
 - a. Tagihan/invoice
 - b. *e-Billing*
3. PIHAK KEDUA akan membayarkan Harga Sewa sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini secara penuh kepada PIHAK KESATU dalam waktu paling lambat bersamaan dengan tanggal perjanjian ini ditandatangani, yaitu dengan cara transfer/penyetoran ke rekening Kas Negara berdasarkan tagihan *e-Billing* yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU melalui bank persepsi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan PIHAK KEDUA akan memberikan tanda bukti pembayaran kepada PIHAK KESATU, sedangkan PIHAK KESATU akan memberikan kwitansi kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan Sebagian tanah untuk dimanfaatkan dalam Objek Sewa.
2. PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA untuk dapat memanfaatkan Objek Sewa setelah perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar Harga Sewa sebagaimana tersebut pada Pasal 5 perjanjian ini
2. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk mengambil tindakan didalam objek Sewa atau bagian lainnya yang menyebabkan kerusakan atau gangguan terhadap PIHAK KESATU atau penyewa lainnya, kecuali kegiatan rutin sehubungan dengan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung.

3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan objek sewa yang telah disewa dari PIHAK KESATU kepada pihak lain tanpa persetujuan Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Barang.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan Objek sewa.
5. PIHAK KEDUA dapat memasang KWH meter secara terpisah dari jaringan instalasi listrik PIHAK KESATU. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pemakaian biaya listrik sesuai dengan tarif PLN yang berlaku, dan segala biaya yang timbul atas pemasangan instalasi listrik tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
6. PIHAK KEDUA bersedia menyerahkan kembali Objek sewa (BMN) kepada Negara, jika sewaktu-waktu Negara memerlukan, tanpa menuntut ganti rugi.

PASAL 8 KETENTUAN TUNTUTAN

1. PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan dan kehilangan di dalam Objek Sewa yang disebabkan kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KESATU menjamin selama Jangka Waktu Sewa, PIHAK KEDUA tidak akan mendapat gangguan dalam bentuk apapun dari pihak ketiga atau pihak lainnya sehubungan dengan pemanfaatan objek Sewa.

PASAL 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Apabila setelah tanggal berakhirnya Perjanjian dan PARA PIHAK tidak memperpanjang Perjanjian tersebut, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan Objek Sewa dalam keadaan baik sesuai kondisi terakhir dan atau semula ketika pelaksanaan sewa berakhir.
2. Selama Jangka Waktu Sewa apabila tidak ada pelanggaran syarat dan ketentuan perjanjian dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA atas kehendak sendiri dapat mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pengakhiran kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU berhak atas sisa Harga Sewa sebanding dengan Jangka Waktu Sewa yang belum dinikmati oleh PIHAK KEDUA.
3. Perjanjian dapat diakhiri jika PARA PIHAK dapat terbukti melanggar salah satu atau beberapa ketentuan dalam perjanjian ini dan tidak memberikan tanggapan baik secara lisan maupun tertulis. PIHAK KESATU tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan Harga Sewa dan menjadi milik Negara.
4. Apabila terjadi kebijakan dari Pemerintah dan/atau Mahkamah Agung RI yang berakibat adanya pengakhiran/pemutusan perjanjian ini sehingga menyebabkan PIHAK KESATU tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, maka PIHAK KESATU tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan Harga Sewa yang telah dibayar oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 10 FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

1. Tidak satu pihak pun dalam Perjanjian ini yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam hal tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force*



- majeure*) seperti bencana alam, kebakaran, huru-hura, perang atau kudeta yang mengakibatkan tempat yang disewa hancur atau rusak sama sekali.
2. Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak saat mulai dan berakhirnya *force majeure* yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah yang berwenang.
 3. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadi *force majeure* bukan merupakan tanggungjawab pihak lainnya.

PASAL 11 DENDA DAN SANKSI

1. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran sewa oleh PIHAK KEDUA melewati waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, maka PIHAK KESATU akan mengenakan denda kepada PIHAK KEDUA yaitu sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah yang masih harus dibayarkan dengan waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
2. PIHAK KESATU mengenakan sanksi berupa surat teguran kepada PIHAK KEDUA dalam hal yang bersangkutan belum melakukan perbaikan dan/atau penggantian dalam rangka pengembalian ke dalam kondisi baik dan layak fungsi BMN yang disewa, dan/atau belum menyerahkan BMN yang disewa kepada PIHAK KESATU ketika pelaksanaan sewa berakhir.
3. Dalam hal sampai dengan 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana ayat 2 belum dilakukan tindak lanjut oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU mengenakan sanksi berupa surat peringatan PIHAK KEDUA.
4. Dalam hal sampai dengan 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana ayat 3 belum dilakukan tindak lanjut oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU mengenakan sanksi administratif berupa denda, dengan ketentuan:
 - a. sebesar 2% (dua persen) per hari dari nilai perbaikan dan/atau penggantian yang masih terutang; atau
 - b. sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari besaran sewa sesuai ketentuan yang berlaku yang dihitung dengan menggunakan periode sewa harian sesuai keterlambatan penyerahan BMN.
5. Dalam hal terdapat denda, mekanisme pembayaran denda merujuk pada ketentuan yang berlaku.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat.
2. Jika dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menempuh cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, PARA PIHAK tetap tidak mencapai kesepakatan dalam penyelesaian tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tepat dan tidak berubah di kantor Pengadilan Negeri setempat.



PASAL 13
PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan akan dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lainnya melalui pos atau kurir dengan disertai bukti tanda tangan terima dan dari pihak yang menerima kepada alamat berikut:

PIHAK KESATU : KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Jl. Ahmad Yani No 133 Sidikalang

Telepon : (0627) 21053

Fax: (0627) 21

Up. Ketua Pengadilan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang

PIHAK KEDUA : Victor Hamonangan Simanjuntak

Jl. Ahmad Yani No 133 Sidikalang

PASAL 14
LAIN-LAIN

1. Segala hal yang sudah dan belum diatur dalam perjanjian ini tunduk dan patuh terhadap ketentuan pemerintah atau turunannya tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Negara.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan perubahan-perubahannya, akan yang diatur kemudian dalam Addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum sama dengan perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memegang satu aslinya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Perjanjian ini.

PIHAK KESATU
Pengadilan Negeri Sidikalang



Danny Irawan Manurung, S.Kom.

PIHAK KEDUA



Victor Hamonangan Simanjuntak



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN
UMUM PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

Jalan Ahmad Yani Nomor 133 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten
Dairi, Sumatera Utara Kode Pos 22212

www.pn-sidikalang.go.id, info@pn-sidikalang.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN OPNAME FISIK (STOCK OPNAME) PERSEDIAAN (01)

Nomor: 2064 /SEK.PN.W2-U14/PL1.2.7/XII/2024




Nama Satker : Pengadilan Negeri Sidikalang
Kode Satker : 0050700098654000KD
UAPPB-W : Pengadilan Tinggi Agama Medan
UAPPB-EI : Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-12-2024), bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Sidikalang, kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Panitia Opname Fisik Persediaan:


1. Nama : Danny Irawan Manurung, S.Kom
NIP : 19840309 201101 1 005
Jabatan : Sekretaris
2. Nama : Redia Sianturi, S.E.
NIP : 19860729 201903 2 004
Jabatan : Kasubag. Umum dan Keuangan
3. Nama : Monika Desi Deria Nainggolan
NIP : -
Jabatan : Operator Persediaan

Menyatakan bahwa telah melakukan opname fisik barang persediaan Periode Semester II Tahun 2024, dengan hasil sebagaimana terlampir dalam hasil opname fisik. Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik)

1. Danny Irawan Manurung, S.Kom. : 
2. Redia Sianturi, S.E. : 
3. Monika Desi Deria Nainggolan : 

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Negeri Sidikalang


Danny Irawan Manurung, S.Kom.

LAPORAN INVENTARISASI BARANG PERSEDIAAN (01)
PERIODE SEMESTER II TAHUN 2024

Nama Satker : Pengadilan Negeri Sidikalang
Kode Satker : 0050700098654000KD
UAPPB-W : Pengadilan Tinggi Agama Medan
UAPPB-EI : Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI

No	Nama Barang	Kode Barang	Satuan	Kuantitas Barang		Selisih	Kondisi		
				Menurut Laporan Persediaan	Hasil Check Fisik		Baik	Usang	Rusak
1.	Ballpoint Faster	1010301 0010000 08	Kotak	2	2	-	B	-	-
2.	Binder Klip No 107	1010301 0100000 12	Kotak	2	2	-	B	-	-
3.	Klip Atom	1010301 0100000 16	Kotak	3	3	-	B	-	-
4.	Isi Staples No 10	1010301 0130000 01	Kotak	2	2	-	B	-	-
5.	HVS A4	1010302 0010000 06	Rim	2	2	-	B	-	-
6.	Kertas HVS F4	1010302 0010000 07	Rim	2	2	-	B	-	-
7.	Kertas Sticker	1010302 0020000 07	Bungkus	2	2	-	B	-	-
8.	Amplop Kuning Kecil	1010302 0040000 01	Bungkus	5	5	-	B	-	-
9.	Bungkus CD	1010304 0020000 01	Bungkus	2	2	-	B	-	-
10.	Tinta Printer Warna	1010304 0040000 01	Kotak	7	7	-	B	-	-
11.	Tinta Printer Hitam	1010304 0040000 02	Kotak	5	5	-	B	-	-

Sidikalang, 31 Desember 2024
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Negeri Sidikalang



Danny Irawan Manurung, S.Kom.